

12. URUSAN PENANAMAN MODAL

Urusan Penanaman Modal dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah.

a. Alokasi Program dan Kegiatan

Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo pada tahun 2017 telah mengalokasikan dana sebesar **Rp. 5.764.502.817,-** atau 0,29% dari total alokasi APBD tahun 2017 yang berjumlah Rp. 2.000.613.704.761,-. Alokasi sebesar Rp. 5.764.502.817,- dapat terealisasi sebesar **Rp. 5.049.558.970,0,-** atau 87,60%. Adapun program dan alokasi anggaran urusan Penanaman Modal dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.C.12.1
Alokasi Program Anggaran Urusan Penanaman Modal Tahun 2017

No.	Program	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)
A	Belanja Langsung	3.268.655.000	2.938.852.394
1	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	1.025.600.000	959.361.880
2	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	1.125.000.000	998.839.405
3	Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah	150.000.000	33.469.500
4	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	400.837.500	392.097.565
5	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	567.217.500	555.084.044
B	Belanja Tidak Langsung	2.495.847.817	2.110.706.576
1	Belanja Pegawai	2.495.847.817	2.110.706.576
JUMLAH		5.764.502.817	5.049.558.970

Sumber : APBD Kabupaten Wonosobo 2017 (diolah)

b. Program dan Kegiatan

1) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Program ini bertujuan untuk membawa citra daerah sebagai daerah tujuan investasi yang menarik dengan sasaran meningkatnya jumlah minat investor untuk melakukan investasi. Yang dilaksanakan melalui kegiatan penyusunan profil investasi dalam bentuk video profil investasi, promosi investasi untuk meningkatkan kerjasama penanaman modal dan penyampaian informasi potensi investasi serta pengadaan sarana prasarana berupa booklet maupun leaflet.

2) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Program ini bertujuan untuk meningkatkan daya dukung daerah dalam rangka mendorong investasi agar semakin meningkat didukung iklim investasi yang

III.C.12. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Penanaman Modal

konduktif. Kegiatan yang dilaksanakan adalah terkait dengan perijinan berupa sosialisasi, pengkajian, monitoring evaluasi, pengembangan aplikasi untuk meningkatkan pelayanan serta peningkatan kualitas SDM pelayanan investasi.

3) Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah

Program ini ditetapkan untuk mengetahui bangunan yang telah memiliki IMB dan yang belum ber IMB sebagai dasar untuk mengetahui kesesuaian fungsi ruang yang dilaksanakan melalui pemetaan.

4) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini ditetapkan untuk dapat tercapainya tujuan organisasi dalam jangka panjang yaitu terwujudnya kualitas administrasi perkantoran yang tertib dan lancar serta terlaksananya tugas kedinasan dengan cepat dan akurat yaitu melalui kegiatan: Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, Penyediaan Alat Tulis Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, Penyediaan Makanan dan Minuman, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah, Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan, Penyelesaian Pekerjaan Kantor, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan.

5) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini ditetapkan untuk dapat tercapainya tujuan organisasi dalam jangka panjang yaitu terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan yaitu dengan melalui kegiatan: Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor, Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kantor.

c. Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal

Capaian kinerja urusan Penanaman Modal di Kabupaten Wonosobo dapat dilihat dari Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel III.C.12.2
Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2017
Berdasarkan Indikator Kunci EKPPD

No.	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Capaian Kinerja		
		2015	2016	2017
1	Kenaikan / penurunan nilai realisasi PMDN (Realisasi PMDN thn 2017 (Rp. 262.869.324.272) – Realisasi PMDN 2016 (Rp. 767.948.933.009) /	40,14%	145,41%	-65,77%

III.C.12. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Penanaman Modal

No.	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Capaian Kinerja		
		2015	2016	2017
	Realisasi PMDN 2016 (Rp. 767.948.933.009) x 100%			

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo, 2017

Keterangan :

Nilai investasi didasarkan pada jumlah modal usaha yang dipantau melalui penerbitan Ijin Usaha.

Belum semua masyarakat melaporkan pengurusan ijin, sehingga bagi usaha-usaha yang belum berijin tidak dapat dipantau nilai investasinya.

Capaian indikator kinerja urusan penanaman modal yaitu nilai realisasi PMDN, pada tahun 2017 menunjukkan hasil negatif yaitu -65,77%. Nilai ini didapatkan dari jumlah PMDN tahun 2017 sebesar Rp. 262.869.324.272,- yang menurun sangat drastis dibandingkan tahun 2016 yang berjumlah Rp. 767.948.933.009,-. Penurunan ini disebabkan pada tahun 2017 perusahaan yang melakukan perijinan lebih sedikit dibandingkan tahun 2016 (Nilai investasi dihitung berdasarkan perijinan yang masuk ke DPMPSTSP Kabupaten Wonosobo).

Tabel III.C.12.3
Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal
Berdasarkan Indikator RKPD 2017

N O	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	REALISASI CAPAIAN 2016	TARGET TAHUN 2017	REALISASI CAPAIAN 2017	% REALISASI CAPAIAN 2017	STATUS CAPAIAN
1	Persentase kenaikan jumlah kerjasama investasi	0%	12%	0%	0	↓
2	Persentase kenaikan Jumlah investor berskala nasional (PMDN)	0	0	0%	0	↓
3	Jumlah Nilai investasi (PMDN)	768,100,000,000	1,500,000,000,000	262.869.324.272	17.52	↓
4	Daya Serap Tenaga Kerja (perbandingan antara jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan PMA/PMDN terhadap PMDN dan PMA)	98	66	16	24.24	↓
5	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan bidang penanaman modal melalui PTSP	38.19%	83.33%	83.33%	100	○
6	Persentase implementasi SPIPISE	100%	100%	100.00%	100	○
7	Rata-rata lama proses perijinan (hari)	4	6	4	150	○

III.C.12. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Penanaman Modal

N O	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	REALISASI CAPAIAN 2016	TARGET TAHUN 2017	REALISASI CAPAIAN 2017	% REALISASI CAPAIAN 2017	STATUS CAPAIAN
8	Persentasi potensi investasi yang sudah memiliki FS	0.16	20%	16%	80	↓

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo, 2017

Keterangan Status Capaian :

○	Tercapai	Realisasi capaian sudah $\geq 100\%$
→	Tidak tercapai	Realisasi capaian 90% - 99%
↓	Tidak tercapai dan perlu upaya keras	Realisasi capaian $\leq 90\%$

Berdasarkan indikator capaian RKPD 2017 terdapat 8 indikator urusan penanaman modal, di mana 3 indikator tercapai, 5 indikator tidak tercapai dan perlu upaya keras yaitu Persentase kenaikan jumlah kerjasama investasi, Persentase kenaikan Jumlah investor berskala nasional (PMDN), Jumlah Nilai investasi (PMDN), Daya Serap Tenaga Kerja (perbandingan antara jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan PMA/PMDN terhadap PMDN dan PMA) Daya Serap Tenaga Kerja (perbandingan antara jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan PMA/PMDN terhadap PMDN dan PMA) dan Persentasi potensi investasi yang sudah memiliki FS Persentasi potensi investasi yang sudah memiliki FS.

Di dua tahun terakhir yaitu tahun 2016 dan tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Wonosobo tidak melakukan kerjasama di bidang investasi sehingga tidak ada investor berskala nasional (PMDN) yang masuk ke Kabupaten Wonosobo. Jumlah investor berskala nasional (PMDN) di Kabupaten Wonosobo sebanyak 460 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja yang sebanyak 5.924 orang. Dengan demikian daya serap tenaga kerjanya juga masih rendah. Dari 460 proyek investasi yang ada di Kabupaten Wonosobo, pada tahun 2017 menghasilkan nilai sebesar 262.869.324.272. Nilai investasi ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2016 karena pada tahun 2017 perusahaan yang melakukan perijinan lebih sedikit dibandingkan tahun 2016 (Nilai investasi dihitung berdasarkan perijinan yang masuk ke DPMPSTSP Kabupaten Wonosobo). Sedangkan untuk potensi investasi di Kabupaten Wonosobo pada tahun 2017 terdapat 12 potensi investasi, di mana yang sudah memiliki FS ada dua, dan dua lainnya sudah ada investornya.

d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Tabel III.C.12.4
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
DPMPTSP

No	Indikator	Jumlah
2	Tingkat Pendidikan	3
	a. S-2	9
	b. S-1	9
	c. DI-DIV	5
	d. SMA	3
	e. SMP	-
	f. SD	-
	Jumlah	20
3	Golongan	
	a. Golongan IV	4
	b. Golongan III	14
	c. Golongan II	2
	d. Golongan I	-
	e. Tenaga Kontrak	-
	f. THL/GTT/PTT	-
	Jumlah	20
4	Pejabat/Struktural	
	a. Eselon II	-
	b. Eselon III	4
	c. Eselon IV	6
	Staf/Fungsional Umum	10
	Jumlah	20

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Wonosobo, 2018

e. Kondisi Sarana dan Prasarana

Tabel III.C.12.5
Kondisi Sarana dan Prasarana
DPMPTSP

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
A	ASET TETAP	4.206.536.958,00
1	Tanah	752.091.000,00
2	Peralatan dan Mesin	2.059.282.051,00
02	Alat-alat Besar	19.350.000,00
03	Alat-alat Angkutan	711.889.425,00
04	Alat Bengkel dan Alat Ukur	15.494.600,00
05	Alat Pertanian	0,00
06	Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.239.185.926,00
07	Alat Studio dan Alat Komunikasi	73.362.100,00
08	Alat-alat Kedokteran	0,00
09	Alat Laboratorium	0,00
10	Alat-alat Perenjataan/Keamanan	0,00
3	Gedung dan Bangunan	1.395.163.907,00
11	Bangunan Gedung	1.195.092.600,00
12	Monumen	200.071.307,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00
13	Jalan dan Jembatan	0,00
14	Bangunan Air/Irigasi	0,00
15	Instalasi	0,00
16	Jaringan	0,00
5	Aset Tetap Lainnya	0,00
17	Buku dan Perpustakaan	0,00
18	Barang Bercorak Kebudayaan	0,00
19	Hewan dan Ternak serta Tanaman	0,00
20	Aset Renovasi	0,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00
B	ASET LAINNYA	0,00
7	Aset Lainnya	0,00
21	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	0,00
22	Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain	0,00
24	Aset Tidak Berwujud	0,00

Sumber: BPPKAD Kabupaten Wonosobo, 2018

f. Permasalahan dan Solusi

Dalam melaksanakan urusan Penanaman Modal, beberapa permasalahan dan solusi yang perlu diupayakan yaitu :

Tabel III.C.12.6
Matriks Permasalahan dan Solusi pada Urusan Penanaman Modal

No.	Masalah	Solusi
1	Belum tersedianya regulasi khusus yang mengatur tentang penanaman modal termasuk pemberian insentif kepada investor di Kabupaten Wonosobo	Penyusunan regulasi tentang penanaman modal dan pemberian insentif kepada investor
2	Belum adanya peta dan peluang investasi Kabupaten Wonosobo	Melaksanakan kajian dan penyusunan peta potensi dan peluang investasi
3	Kurangnya promosi investasi yang dilakukan sehingga informasi tentang potensi investasi belum banyak diketahui oleh calon investor	Meningkatkan dan optimalisasi promosi investasi baik di dalam daerah maupun di luar daerah